

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Akhir dasawarsa 1960-an, modernisasi menjadi wacana yang berkembang di Indonesia sehingga pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto menetapkan modernisasi sebagai suatu pilihan ekonomi, politik, sosial dan budaya (Piscatori dalam Ridwan, 2002: 75). Sebagai pilihan yang rasional, modernisasi yang dilakukan oleh Orde Baru erat kaitanya dengan eksperimen dan invensi untuk mengubah pandangan hidup manusia. Eksperimen ini dilakukan untuk memperbaiki citra politik Orde Lama dibawah naungan Soekarno yang diwarnai dengan “krisis politik dan mitos revolusi (Feith dan Castle, 1988: 25).

Perlu dicatat, bahwa modernisasi yang bernaung dibawah Orde Baru “memaksa” umat Islam terutama kaum intelektualnya untuk melakukan interpretasi dan menyesuaikan agar mereka tetap eksis. Politik Orde Baru telah diformat untuk restrukturisasi guna menopang akselerasi dan pembangunan ekonomi. Ketidapatuhan terhadap Rezim Orde Baru menjadikan umat Islam sebagai kambing hitam ideologi (*ideological scapegoat*). Umat Islam terus dicurigai dan dianggap tidak mempercayai Pancasila dan anti pembangunan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Bahtiar Effendy (1998: 4):

Kecurigaan dan antagonisme politik ini, yang antara lain disebabkan oleh apa yang dianggap sebagai “ideologi Islam”, telah menyebabkan Islam politik pada posisi pinggiran. Sampai pada pertengahan 1980, dilihat dari perspektif manapun Islam telah “terkalahkan”. “Pengalahan” ini dimaksudkan untuk memotong “gigi politik” Islam, karena Islamlah yang selama ini sebagai pesaing utama politik Soekarno dan Soeharto.

Atas dasar inilah rehabilitasi Masyumi mengalami kegagalan. Ketakutan Rezim Orde Baru terutama golongan militer akan adanya kekuatan baru politik yang mampu menyaingi atau minimal mampu mengontrol gerak-gerik penguasa menjadi alasan fundamental mengapa Masyumi tidak bisa direhabilitasi. Dengan gagalnya rehabilitasi Masyumi, kondisi perpolitikan Era Orde Baru tidak terlepas dari konflik antara Islam dan Negara.

Abdul Aziz Thaba membagi tiga periode hubungan antara Islam dan negara dalam tiga periode (Thaba, 1996: 26).

1. Periode Antagonistik (1967-1982). Pada fase ini, hubungan Islam dan negara diwarnai dengan pola antagonis dimana Islam berada dipinggiran dan negara bersifat hegemonistik. Hubungan ini dilatarbelakangi oleh Orde Baru yang tidak mau merehabilitasi masyumi. Pemerintah menganggap Islam sebagai ancaman sehingga banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak berpihak pada Islam.
2. Hubungan resiprokal kritis (1982-1985). Fase ini ditandai dengan mulisi adanya pengertian antara negara dengan Islam walaupun hubungan antagonistik masih ada. Negara memandang Islam sebagai kekuatan besar untuk mensukseskan program pembangunan nasional. Namun pada fase ini juga hubungan ketegangan antara negara dan Islam ada pada titik puncak atas diberlakukannya asas tunggal pancasila
3. Hubungan akomodatif (1985-1994). Pada periode ini, pola interaksi antara negara dan Islam bebrubah dimana negara mulai mengakomodasi dan meminimalisasi hubungan antagonistik. Berbagai tuduhan terhadap Islam mulai

menghilang dan pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada Islam.

Format sosial keagamaan dan politik pada kurun waktu 1983-1998 harus tidak bisa diepaskan dari tahun 1978 dimana menjadi *fase pertama* hubungan antara negara dan Islam Era Orde Baru yang ditandai saat Soeharto sebagai Presiden sudah mengumpulkan kekuatan dengan menguasai politik melalui sentralisasi kekuasaan dengan bingkai otoritarianisme (Fatah, 1999: 50). Pada *Fase kedua*, berlangsung sejak 1985-1989 dimana terjadi beberapa perubahan yang dilakukan dimana Soeharto mampu memformat politik yang kemudian dilegalisasi melalui UU No 1 Tahun 1985. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab Soeharto menjadi pemimpin yang *untouchable*. Selain itu, diberlakukannya asas tunggal Pancasila juga upaya marginalisasi terhadap Islam ideologis melalui kebijakan tersebut. Konfigurasi ini berakibat pada pergeseran paradigma dari Islam ideologis menjadi Islam politik, bahkan benih-benih Islam kultural mulai muncul. *Fase ketiga* dimulai pada 1989 saat Soeharto mulai mendekati golongan Islam, karena semua format politik telah diselesaikan sehingga perlu dilengkapi dengan legitimasi moral yang harus diambil dari golongan umat Islam yang merupakan basis populis terbesar (Thaba, 1996: 52).

Dilihat dari format sosial politik tersebut berpengaruh juga pada Perkembangan dinamika intelektual Islam, salah satunya adalah mengenai wacana pembaruan pemikiran Islam. Pembaruan pemikiran harus dilakukan karena realitas yang ada sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Salah satu intelektual yang mampu menangkap perbedaan realitas tersebut adalah Nurcholish Madjid (Cak Nur). Pemikiran-pemikirannya mulai berkembang pesat saat dia menjadi Ketua

Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 1966-1971. Pemikirannya bertumpu pada modernisasi Islam yang disandarkan pada nilai-nilai keislaman. Cak Nur dengan berani membawa isu modernisme dan menganggap bahwa pemikiran Islam pada masa itu telah mengalami stagnansi dan kejumudan. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak maju.

Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh pergaulannya di HMI, apalagi pasca melakukan perjalanan ke Amerika dan Eropa membuat pemikirannya semakin terbuka. Ikon sebagai pemikir dilekatkan terhadap Cak Nur pada usia yang relatif muda. Pemikirannya-pemikirannya merupakan sebuah refleksi dari kegiatan keagamaannya, organisasi dan pendidikannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa buah pikirnya merupakan akumulasi perjalanan hidupnya (Thaha dalam Harahap, 2004:72)

Pemikiran modernisasinya merupakan sebuah rasionalisasi atas tindakan kerja yang tidak rasional, menggantikan dengan tata kerja baru yang rasional (Madjid, 2019: 239). Tujuan utama modernisasi adalah melaksanakan perintah Tuhan untuk menggunakan daya pikir dan bekerja maksimal untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Cak Nur juga menjelaskan lebih lanjut mengenai modernisasi, bahwa modernisasi bukan berarti *westernisasi* yang banyak dianggap sebagai tradisi kekristenan yang berhasil memisahkan agama dengan negara (Madjid 2019: 2876). Pengalaman ini tidak lain karena Eropa pada saat itu masih belum menemukan titik terang mengenai makna rasional. Eropa masih terkungkung dalam tindakan inklusifitas dan intimidasi Gereja terhadap kebebasan berfikir. Embrio rasionalisasi secara tidak langsung dipengaruhi oleh

*Averriosme*. *Averriosme* tidak lain adalah pemikiran Ibnu Rusyd yang didasarkan pada rasionalitas Aristotelianisme yang telah “diIslamkan”. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa barat merupakan kontinuitas dari peradaban Islam.

Pengalaman lain juga digambarkan melalui kemajuan masyarakat Jepang. Argumentasi bahwa modernisasi yang selalui diidentikan dengan barat dapat dipatahkan. Dean dalam Madjid menyebut Jepang sebagai *Asian Westernism* (Madjid, 2019: 2878), namun pendapat lain diungkapkan oleh Bellah bahwa Jepang adalah *non-western modernism* yang mana Jepang merupakan negara tercepat yang mengadopsi nilai-nilai yang diperlukan oleh negaranya untuk kemajuan industrial modern (Bellah dalam Madjid, 2019: 2878).

Di dalam dunia Islam, terminologi sekuler ini pertama kali populerkan oleh Zia Gokalp yang merupakan sosilog dan teoretikus nasionalis asal Turki. Dalam pandangannya, sekuler dipahami sebagai pengertian irreligius bahkan anti-religius. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa. Pada sisi lain Hugo F. Reading mengemukakan bahwa proses pemindahan fungsi non-religius dan fungsi religius kedalam organisasi dunia disebut sebagai sekularisasi (*secularization*). Jika dipandang dari sisi sosiologis, ada keterkaitan antara masyarakat agama dan sekularisasi dan sekularisme. Karena manusia dapat melepaskan diri dari dogma-dogma agama atau tradisi yang mengikat, maka jika semuanya bisa terlepas dari dari dogma atau tradisi yang menghambat perubahan tidak akan terjadi. Tradisi mempunyai sifat yang mengikat pada masyarakat apalagi agama yang bersumber dari wahyu ilahi. Maka terkadang itulah yang menyebabkan penghambat bagi kemajuan dan modernisasi. Sehingga perlu upaya sekular didalam kehidupan

masyarakat agar terjadi perubahan dan pembaruan. Jika melihat dari sejarah, pembaruan didalam masyarakat Islam juga bersandar pada sekularisasi yang masuk bersamaan dengan tradisi pemikiran barat. Sekularisasi disini tidak melepaskan dari dogma agama, akan tetapi dari tradisi-tradisi ataupun paradigma yang dianggap menjadi dogma agama. Sekularisasi pun terjadi pada institusi masyarakat, seperti di sekolah atau madrasah yang selalu mengajarkan pengetahuan agama dan munculnya sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan duniawi (Sinaga, 2019: 6). Selain itu, sekularisasi juga terjadi pada simbol-simbol tertentu seperti lambang Garuda sebagai dasar negara dan Ganesha sebagai lambang salah satu perguruan tinggi. Kedua lambang tersebut merupakan “bekas” dari makhluk mitologi Hindu yang telah tercabut nilai-nilai sakralnya dan kemudian hanya tersisa sebagai nilai dekoratif dan ornamental saja.

Dewasa ini, konstelasi politik yang membawa agama masih menjadi isu yang laku dipasaran sehingga menyebabkan konflik horizontal karena adanya sentimen masyarakat mengenai preferensi politik yang dipilih. Anggapan masyarakat mengenai politik merupakan bagian dari agama sehingga apabila seseorang tidak memilih menurut kepercayaan agama dianggap telah keluar dari agama itu sendiri. Sebagai contoh, saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, banyak narasi yang menyatakan bahwa preferensi politik harus sesuai dengan keimanan. Pada kasus tersebut menggambarkan bahwa masyarakat masih banyak yang mengira bahwa pilihan politik merupakan bagian dari agama dan bersifat sakral. Padahal jika ditelaah lebih dalam, preferensi politik merupakan bagian dari kehidupan duniawi.

Problematika lain yang muncul juga adanya upaya sakralisasi terhadap Partai Islam yang dianggap satu-satunya representasi suara umat Islam. Hal ini berakibat jika ada masyarakat yang tidak memilih partai Islam dianggap sebagai *kafir*. Anggapan ini merupakan sebuah kesalahan, karena Islam tidak mengajarkan politik praktis dan berupaya mempersempit pilihan politik masyarakat untuk dapat memilih secara rasional.

Adapun liberalisasi merupakan upaya pembebasan dari belenggu-belenggu kepercayaan yang tidak tepat. Sejatinya, proses liberalisasi ini berlangsung sejak lama di Indonesia. Sebagai contoh Muhammadiyah sudah banyak melakukannya, seperti menganggap bedug sebagai penanda waktu shalat bukan bagian dari agama, melainkan budaya. Dengan demikian, implikasi pada tindakan politis merupakan sebuah tindakan untuk memperbaiki serta membuka jalan keluar bagi kebebasan untuk menyatakan pendapat, membatasi kekuasaan yang arbitrer, dan membiarkan tumbuhnya serikat dan kelompok politik.

Adapun kata liberal merupakan terminologi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu liberal yang memiliki arti bebas atau tidak berpolitik. Para penulis banyak yang menggunakan istilah liberal dengan beberapa pengertian yang amat beragam seperti *open minded* (berpikiran terbuka), *generous* (ramah), *moderate* (moderat), *noninterventionist* (tidak memaksakan), *free thinking* (berpikir bebas), *tolerant* (toleran), *laissez faire* (santai), antonimnya adalah *narrow minded* atau berpikiran sempit (Kurzman, 1998: 4).

Liberal disini bukan berarti membebaskan manusia untuk berbuat sesuka hati, tetapi yang dimaksud adalah usaha untuk menghadirkan ulang pemikiran,

pendapat, gagasan ataupun pranata yang dihasilkan di masa lampau untuk dikontekstualisasikan dan dirubah sesuai dengan tuntutan zaman. Liberal bukan seperti paham yang meninggalkan agama dalam mengejar kemajuan sebagaimana terdapat di Barat. Aliran ini menurut Kurzman identik dengan, (1) Perlawanan terhadap ide teokrasi atau negara Islam; (2) Pemikiran demokrasi; (3) Masalah hak-hak perempuan; (4) Masalah hak-hak non- Muslim; (5) Kebebasan berpikir; dan (6) Masalah kemajuan (Progresivitas).

Sebagai bahan komparasi terhadap penelitian ini, ada beberapa penellitian serupa yang bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini maka pada kajian pustaka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini adalah:

- 1) Skripsi yang disusun oleh Rival Rachmat Hidayat (2018) dengan judul “Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Sekularisasi dan Relevansinya dengan Konteks Keislaman dan Kenegaraan di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan metode studi tokoh serta analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sekularisme yang difahami Nurcholish Madjid bukan didasarkan atas penolakan terhadap agama.
- 2) Skripsi yang disusun oleh Dessy Permatasari Sinaga (2019) dengan judul “Sekularisasi Menurut Nurcholish Madjid Argumentasi Filosofis Teologis”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sekularisasi bukan dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, melainkan sebagai *Islamisasi* atau *pentauhidan*.

Sementara itu, penelitian ini berupaya melihat bagaimana pemikiran sekularisme dan liberalisme yang digagas oleh Nurcholish Madjid, sehingga dapat terlihat kesinambungan, kontinuitas (diakronik) dan dinamis, berubah saat tertentu, diskontinu (sinkronik). Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyusun skripsi dengan judul “*Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Sekularisme dan Liberalisme*”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah sekularisme dan liberalisme dalam pemikiran Nurcholish Madjid ?
- b. Bagaimana Hubungan Sekularisme dan liberalisme yang digagas oleh Nurcholish Madjid dengan kondisi sosial politik negara Indonesia?

## 1.3. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan penafsiran dalam judul penelitian, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Sekularisme
2. Liberalisme
3. Nurcholish Madjid atau Cak Nur

## 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan sekularisme dan liberalisme menurut sudut pandang Nurcholish Madjid
2. Mengetahui bagaimana implikasi sekularisme dan liberalisme dengan pandangan Nurcholish Madjid mengenai Islam dan negara

### 1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sumbangsih mengenai khazanah intelektual Islam sebagai alternatif pemikiran. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis

#### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, reflektif dan konstruktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai studi pemikiran Islam.

#### 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat disebarluaskan mengingat masih banyaknya kesimpangsiurna mengenai makna sekularisasi dan liberalisasi sebagai modernisasi pemikiran yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid.